

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Didalam sebuah negara peningkatan ekonomi dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Untuk mencapai hal ini, masalah sosial ekonomi dan pembangunan saat ini harus diatasi. Salah satu komponen yang menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah kemiskinan. Pembangunan ekonomi akan menjadi standar yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara jika standar tersebut tidak bergantung pada atributnya, seperti memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu, diputuskan bahwa peningkatan terjadi apabila masyarakat dapat menghasilkan hal yang akan menjadikan tujuan utama pemerintah Indonesia dalam sektor pembangunan. Ini pasti tidak akan terlepas dari hambatan yang akan dihadapi pemerintah Indonesia saat mencapai tujuan pembangunan utamanya. Hambatan tersebut adalah tidak meratanya pembangunan daerah. Selama ini, fokusnya hanya dikota-kota, mengabaikan masyarakat pedesaan. Kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan dan kurang meratanya pembangunan (Harahap, 2019).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang melibatkan banyak elemen, Serta beberapa faktor pendorongnya termasuk tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa diperkirakan naik turunnya serta masih rendahnya IPM menjadi penyebab timbulnya kemiskinan. Dapat dikatakan miskin apabila belum berpenghasilan dan belum mampu mencukupi kebutuhannya (M. Nasir, 2008). Kemiskinan merupakan masalah bagi individu di masyarakat karena kualitas sumber daya yang sedikit, biaya hidup yang dikeluarkan tidak sesuai dengan gaji yang didapat, dan populasi yang meningkat. Ini membuat sulit bagi mereka dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan ada dimana-mana, terutama di negara yang dalam tahap berkembang. Kemiskinan masih merupakan masalah di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemungkinan masalah kemiskinan dalam waktu dekat belum bisa hilang di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penurunan kemiskinan yang tidak memuaskan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kemiskinan harus dihilangkan sepenuhnya karena merupakan masalah yang kompleks dan berdampak negatif pada kemajuan suatu wilayah.

Persentase penduduk miskin di Indonesia menurun selama lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2023 mengalami penurunan. Di tahun 2019, jumlah masyarakat miskin di Indonesia dengan angka 9,22%, tetapi di tahun 2020 naik menjadi 10,19%, lalu di tahun 2021 kembali turun menjadi 9,71 persen, dan di tahun 2022 juga turun lagi menjadi 9,57 persen, dan pada akhirnya di tahun 2023, jumlah masyarakat yang miskin di Indonesia kembali menurun menjadi 9,40% (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan ini bisa diasumsikan bahwa kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan hanya saja terjadi peningkatan di tahun 2020 karena di tahun tersebut Indonesia memasuki masa pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian di Indonesia sehingga banyak dari perusahaan untuk mengurangi biaya produksi serta pemangkas karyawan.

Menurut Suparlan (2004:31) Selain berdampak pada daya saing dalam berbagai bidang khususnya dalam mencari pekerjaan, pendapatan dan aset yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pendidikan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, menyebabkan kemiskinan juga. Kemiskinan menjadi masalah dalam kemajuan ekonomi yang menghambat harapan setiap negara termasuk Indonesia untuk kehidupan yang adil, sejahtera, dan merata (Naomi et.al., 2022). Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Namun, tingkat kemiskinan di Indonesia berada di antara yang paling rendah di dunia (Yusuf & Sumner, 2015).

Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang penduduknya bekerja sebagai pedagang. Penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beberapa kebutuhan lainnya. Sehingga wajar kemiskinan masih menjadi masalah utama di wilayah ini. Secara umum, kemiskinan dikaitkan dengan pendapatan, bukan hanya sebagai salah satu dimensi perekonomian.

Seringkali, definisi kemiskinan didefinisikan sebagai "kurangnya pendapatan serta kekayaan dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder" Namun, definisi kemiskinan mencakup lebih dari penurunan pendapatan dan kekayaan. (BAPPENAS, 2018)

**Tabel 1. 1 Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2019 -2023**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kep. Mentawai	12,99	13,22	13,37	14,31	13,74	13,76
Kab. Pesisir Selatan	34,92	36,51	35,46	37,41	33,78	35,09
Kab. Solok	32,89	29,74	29,28	30,36	27,16	27,33
Kab. Sijunjung	16,55	16,65	16,28	16,81	15,07	15,02
Kab. Tanah Datar	18,48	16,2	15,34	15,89	14,91	14,57
Kab. Padang Pariaman	33,2	29,48	28,98	30,41	26,44	26,93
Kab. Agam	32,92	33,1	33,31	34,26	31,33	33,41
Kab. Lima Puluh Kota	26,47	26,64	26,43	28,51	26	27,02
Kab. Pasaman	20,31	20,22	20,29	21,57	19,94	19,99
Kab. Solok Selatan	11,85	12,49	12,39	13,41	11,81	11,91
Kab. Dharmasraya	15,42	15,49	15,7	17,6	15,08	15,49
Kab. Pasaman Barat	31,83	31,53	31,64	34,97	32,91	33,52
Kota Padang	44,04	42,44	42,17	48,44	42,37	41,97
Kota Solok	2,29	2,29	1,99	2,31	2,28	2,35
Kota Sawahlunto	1,48	1,35	1,36	1,52	1,47	1,47
Kota Padang Panjang	3,11	3	2,84	3,28	2,89	2,99
Kota Bukittinggi	6,32	6	6,01	6,98	6,16	5,78
Kota Payakumbuh	7,69	7,68	7,74	8,66	8,08	7,88
Kota Pariaman	4,4	4,2	3,66	3,99	3,8	3,91
Provinsi Sumatera Barat	357,13	348,22	344,23	370,63	335,51	340,37

(Sumber :BPS Provinsi Sumatera Barat 2023)

Pada gambar diatas peningkatan warga miskin di Sumbar yakni pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar 3,99% dengan jumlah 348,22% di tahun 2019 menjadi 344,23% di tahun 2020, dan di tahun 2020 hingga 2021 kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dengan angka 26,4%, dengan jumlah angka sebelumnya di tahun 2020 sebesar 344,23% menjadi 370,63% di tahun 2021, dikutip dari website Databoks kenaikan jumlah ini terjadi karena Pandemi *Covid-19* di Sumatera Barat, beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya kemiskinan ini disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja, pengurangan produksi barang oleh beberapa perusahaan induk terhadap anak perusahaan hingga penutupan usaha di sektor UMKM, yang pada akhirnya kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat menjadi tidak stabil, di tahun 2021 hingga 2022 dimana kondisi perekonomian di Sumatera Barat mulai membaik sehingga mengalami penurunan sebesar 35,12% yang sebelumnya di

tahun 2021 370,63% menjadi 335,51% di tahun 2022, lalu di tahun 2022 hingga 2023 penduduk miskin kembali berkurang sebesar 4,86% dimana kondisi ini disebabkan oleh perubahan dari masa Pandemi *Covid-19* ke Endemi *Covid-19* (masa pemulihan).

Tingkat pengangguran adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. menurut Sukirno (2010), tingkat pengangguran adalah perbandingan antara total orang yang belum memiliki pekerjaan atau pengangguran dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia dalam jangka waktu tertentu. Disisi lain, pengangguran adalah ketika seseorang yang bekerja ingin memiliki pekerjaan namun belum mendapatkannya. Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang terdaftar dalam angkatan kerja dan menginginkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Dalam situasi ekonomi, pengangguran adalah masalah sosial yang sering muncul. Tingginya tingkat pengangguran disebut sebagai efek negatif dari kemiskinan. Ketika banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan maka pengangguran akan meningkat (Kurniawan, 2018).

Pengangguran merupakan masalah yang memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan hidup manusia dalam skala ekonomi yang luas. Sebagian besar orang menganggap kehilangan pekerjaan sebagai penurunan standar kehidupan mereka. Oleh karena itu, banyak yang bertanya-tanya bahwa pengangguran adalah pembahasan yang sering diperbincangkan dalam debat politik. Sehingga menjadi pertimbangan bagi para politisi dalam membantu menciptakan lapangan pekerjaan (Mankiw, 2007).

**Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2019-2023 (Persen)**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94
Kab. Dharmasraya	5,06	5,31	5	6,23	6,22
Kota Sawahlunto	6,84	8,2	6,38	5	4,98
Kota Solok	7,06	8,35	5,15	3,9	3,72
Kab. Pesisir Selatan	6,02	7	5,97	4,61	4,75
Kab. Padang Pariaman	6,08	8,13	8,41	6,6	6,69
Kota Pariaman	5,48	5,73	6,09	5,19	5,68
Kota Bukittinggi	6,2	7,51	6,09	4,9	4,99
Kota Payakumbuh	4,13	6,68	6,47	5,16	4,84
Kota Padang Panjang	4,38	7,22	4,9	4,84	5,49
Kab. Pasaman Barat	4,74	4,69	5,02	6,33	6,01
Kab. Pasaman	5,28	5,04	4,92	5,38	5,09
Kab. Solok	4,72	4,65	4,67	5,89	4,99
Kab. Sijunjung	3,64	5,3	3,57	4,87	4,71
Kab. Tanah Datar	3,2	4,79	4,63	5,91	5,35
Kab. Agam	4,78	4,61	5,06	4,93	4,96
Kab. Solok Selatan	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
Kab. Lima Puluh Kota	2,3	3,03	2,25	3,72	3,95
Kab. Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
Kota Padang	8,74	13,64	13,37	11,69	10,86

(Sumber BPS Sumatera Barat 2023 )


Pada gambar diatas dijelaskan bahwa tingkat pengangguran di tahun 2019 sebesar 5,38%, lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 6,88%, kemudian kembali menurun di tahun 2021 menjadi 6,52% dan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 6,28%, selanjutnya di tahun 2023 kemiskinan kembali turun dengan angka 5,94% sehingga dapat disimpulkan kemiskinan di lima tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan.

Selanjutnya yang mempengaruhi kemiskinan selain dari tingkat pengangguran terbuka, adalah faktor Indeks Pembangunan Manusia atau yang kita kenal dengan singkatan (IPM). Indeks pembangunan manusia digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia, beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia termasuk pengetahuan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Menurut Todaro (2011) dalam (Fadila & Marwan, 2020). menemukan bahwa keberhasilan pendidikan dan peningkatan daya produksi bergantung pada kesehatan. Ada kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia, semakin besar kemungkinan penurunan

angka kemiskinan. Namun, ada kemungkinan bahwa ketika tingkat IPM rendah, ada kemungkinan angka kemiskinan akan menurun.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk menghitung tingkat pembangunan manusia suatu negara. sehingga menjadi pertimbangan kinerja pembangunan manusia antar daerah maupun negara (Sundari, 2018). Salah satu parameter strategis yang digunakan dalam menilai secara menyeluruh upaya dan program kerja pembangunan suatu wilayah adalah indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan apakah sebuah negara maju, berkembang, atau terbelakang. Kualitas hidup juga dapat diukur dengan strategi ekonomi (Safuridar & Natasya, 2019).

**Tabel 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Persen)**



Wilayah	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota				
	IPM				
	2019	2020	2021	2022	2023
Padang	82,68	82,82	82,9	83,29	83,58
Bukittinggi	80,71	80,58	80,7	81,42	81,78
Payakumbuh	78,95	78,9	79,08	79,53	79,97
Kota Solok	78,38	78,29	78,41	79,23	79,58
Padang Panjang	78	77,93	77,97	78,78	79,26
Pariaman	76,7	76,9	77,07	77,65	78,13
Sawahlunto	72,39	72,64	72,88	73,73	74,42
Agam	72,37	72,46	72,57	73,29	73,98
Tanah Datar	72,14	72,33	72,46	73,29	73,98
Dharmasraya	71,52	71,51	71,76	72,3	73,04
Padang Pariaman	70,59	70,61	70,76	71,63	72,61
Pesisir Selatan	70,08	69,9	70,03	70,84	71,44
Lima Puluh Kota	69,67	69,47	69,68	70,28	70,7
Kab.Solok	69,08	69,08	69,24	70,02	70,63
Solok Selatan	68,94	69,04	69,23	69,71	70,58
Pasaman Barat	68,21	68,49	68,76	69,57	70,19
Sijunjung	67,66	67,74	67,86	68,69	69,65
Pasaman	66,46	66,64	66,77	67,41	68,13
Kepulauan Mentawai	61,26	61,09	61,35	62,19	63,13
SUMATERA BARAT (Provinsi)	72,39	72,38	72,65	73,26	73,75

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2023)

Dalam data BPS, indeks pembangunan manusia mulai 2019 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar 0,01%, lalu di tahun 2020 hingga 2021 IPM mengalami kenaikan sebesar 0,27% dan lanjut di tahun 2021 hingga 2022 kembali naik sebesar 0,61% hingga tahun berikutnya 2022-2023 IPM naik sebesar 0,49%, kemudian disimpulkan bahwa IPM cenderung meningkat, meskipun terkadang tidak cukup besar.

Pertumbuhan ekonomi merupakan satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan dan perkembangan produksi barang dan jasa. Meskipun sulit untuk menentukan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu, peningkatan produksi barang dan jasa menandakan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, angka yang digunakan untuk menaksir output adalah nilai moneternya, atau nilai PDB.( Primandari, 2018).

Dari perspektif pertumbuhan ekonomi, Simon Kuznetz (1955) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi dengan kemiskinan atau ketimpangan. Dia menyatakan bahwa meskipun kemiskinan akan cukup tinggi pada tahap awal pembangunan suatu negara, seiring berjalannya waktu, tingkat kemiskinan akan berkurang.

**Tabel 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ( Persen)**

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SUMATERA BARAT	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62
Kab.Solok	5,04	-1,14	3,28	4,28	4,36
Sijunjung	4,81	-1,1	3,14	3,93	4,26
Kep. Mentawai	4,73	-1,85	2,87	4,94	4,04
Pes. Sel	4,78	-1,11	3,35	4,01	4,19
Tanah Datar	4,99	-1,12	3,27	4,16	4,44
Lima Puluh Kota	5,06	-1,16	3,33	4,02	4,55
Agam	4,78	-1,37	3,7	4,21	4,52
Padang Pariaman	2,4	-10,46	2,15	6,83	5,46
Pasaman	4,8	-0,87	3,35	4,08	4,41
Solok Selatan	4,86	-1,24	3,32	4,01	4,57
Dharmasraya	4,94	-1,39	3,4	4,27	4,35
Pasaman Barat	4,45	-1,34	3,71	4,13	4,33
Padang	5,64	-1,86	3,65	4,31	4,54
Kota Solok	5,49	-1,42	3,55	4,6	4,81
Bukittinggi	5,84	-1,74	3,61	4,67	4,79
Padang Panjang	5,56	-1,44	3,46	4,39	4,84
Sawahlunto	5,31	-1,27	2,48	3,96	4,46
Payakumbuh	5,89	-1,65	3,58	4,51	4,7
Pariaman	5,3	-1,32	3,51	4,53	4,79

(Sumber: BPS Sumatera Barat, 2023)

Berdasarkan data yang disajikan terlihat pertumbuhan ekonomi pada wilayah Sumatera Barat dalam rentang tahun 2019-2020 terjadi penurunan dengan menunjukkan persentase sebesar 5,01% menjadi -1,61%, Selanjutnya pada tahun

2021 hingga 2023 terjadi peningkatan setiap tahun nya mencatatkan nilai sebesar 4,62%.

Fenomena di atas dapat berdampak langsung pada kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan. Ini membuatnya menarik untuk diteliti. Dengan sebab itu juga, peneliti membuat sebuah riset yang berkaitan dengan topik tersebut dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia serta Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan berfokus pada penjelasan tentang berbagai fenomena yang terkait dengan TPT, IPM, PE Provinsi Sumatera Barat dan Kemiskinan. Dalam menjelaskan tujuan penelitian ini adalah, bagaimana TPT, IPM, PE mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat mulai rentang tahun 2019 hingga tahun 2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana TPT, IPM, PE mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak:

- a. Penulis dapat mengetahui berapa besar pengaruh TPT, IPM, dan Pendapatan Ekonomi dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, peneliti/penulis memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh semasa perkuliahan juga nantinya dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas akhir



perkuliahan guna mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, sekaligus kemungkinan dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahkan sebagai referensi bagi mereka yang mencari informasi tentang kemiskinan.

- b. Pemerintah dapat melihat dan mempertimbangkan faktor apa saja yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan di Sumatera Barat guna mengurangi kemiskinan di masa depan dan mendorong ekonomi Provinsi Sumatera Barat terus meningkat dari sebelumnya.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, saya berharap penelitian ini menjadi acuan serta dapat dijadikan literatur dalam meneliti faktor-faktor tingkat kemiskinan kedepannya.

